

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN

**Alamat : Jl. Karya Jasa No. 10 Lubuk Pakam, Deli
Serdang, Sumatera Utara, 20514.**

Nomor Telepon : 061-7956298

Website : <https://www.disperkimdeliserdang.com>

E-mail : disperkim@deliserdangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKjIP Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan selama Tahun Anggaran 2025, yang berpedoman pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus sebagai media evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah.

Pada tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan difokuskan pada penguatan kualitas pelayanan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Berbagai upaya perbaikan tata kelola, peningkatan koordinasi, dan optimalisasi pelaksanaan program terus dilakukan guna mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

LkjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan pencapaian kinerja serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan kinerja di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tahun 2025

Lubuk Pakam, Maret 2026

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN



YETTY SEMBIRING, S.STP, M.M
NIP. 19790528 199803 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penyelarasan Latar Belakang dengan Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Deli Serdang.....	2
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	4
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	5
1.2.2 Anggaran.....	7
1.3 Dasar Hukum	7
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	8
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 dan Rekomendasi LkjiP Tahun 2024.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	12
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	16
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Capaian Kinerja	28
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	29
3.1.2 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Tahun Pelaporan	29
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	31

3.1.4	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	33
3.1.5	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	34
3.1.6	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	36
3.1.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	40
3.1.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	42
BAB IV PENUTUP.....		69
LAMPIRAN		70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n.....	7
Tabel 1.2	Tindak Lanjut atas Laporan hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 dan Rekomendasi LkjIP Tahun 2024	9
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	12
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n.....	14
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun n DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	16
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Tahun 2025	18
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Tahun 2025.....	19
Tabel 2.6	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Tahun 2025.....	20
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja.....	29
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun n.....	30
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	31
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	33
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota	35
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.....	36
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	40
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	43
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	6
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada

perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.1.1 Penyelarasan Latar Belakang dengan Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Deli Serdang

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan berkomitmen dalam mewujudkan hunian yang layak dan lingkungan yang sehat. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun berjalan, instansi telah mencapai progres yang signifikan, namun masih menghadapi tantangan pada beberapa indikator utama:

Sektor Perumahan: Capaian rumah layak huni berada pada angka 40,32% dari target 40,95%. Hal ini menunjukkan masih adanya gap sebesar 0,63% yang harus dikejar.

Kawasan Permukiman: Luasan kawasan kumuh berada pada angka 0,117%, sedikit di atas ambang target 0,11%, yang menandakan perlunya intensifikasi penanganan fisik lingkungan.

Infrastruktur & Pertanahan: Capaian PSU dan layanan pertanahan menunjukkan efektivitas yang baik dengan tingkat capaian target mencapai 100%, meskipun dari sisi realisasi anggaran pertanahan masih terdapat efisiensi/sisa yang cukup besar (realisasi 22,85%).

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan memiliki peran vital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar akan tempat tinggal yang layak. Hal ini sejalan dengan mandat konstitusi yang mewajibkan negara menjamin hak setiap warga negara untuk bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk mengukur keberhasilan tersebut, ditetapkan sasaran strategis yang mencakup

ketersediaan hunian layak, penataan kawasan kumuh, pemenuhan PSU, hingga tertib administrasi pertanahan.

Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan atau isu strategis yang menjadi fokus perhatian pada periode ini, antara lain:

1. Kesenjangan Akses Hunian bagi MBR: Masih terdapat gap yang signifikan pada pemenuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Isu utama terletak pada keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan formal, sehingga angka backlog dan keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menjadi prioritas penanganan utama melalui program rehabilitasi maupun pembangunan baru.
2. Kompleksitas Kawasan Permukiman Kumuh: Pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat jika tidak dibarengi dengan penataan yang baik akan memperluas kawasan kumuh. Penanganannya tidak hanya soal fisik bangunan, tetapi juga integrasi Penataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan tersebut.
3. Pengembangan Berbasis Komunitas: Adanya pergeseran pendekatan pembangunan yang kini lebih menekankan pada partisipasi masyarakat (berbasis komunitas) guna menjamin keberlanjutan lingkungan hunian yang dibangun.
4. Legalitas dan Administrasi Pertanahan: Ketersediaan lahan untuk kepentingan umum dan tertib administrasi pertanahan menjadi pondasi utama agar pembangunan infrastruktur dasar dapat berjalan tanpa hambatan legalitas di masa depan.

Isu-isu strategis di atas secara langsung mempengaruhi capaian indikator kinerja utama Dinas. Misalnya, keberhasilan penanganan RTLH akan terdokumentasi pada indikator "Persentase rumah tangga menempati rumah layak huni". Begitu pula dengan penataan PSU yang menjadi kunci dalam menurunkan "Persentase luasan kawasan kumuh"

Menanggapi kondisi dan isu di atas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menetapkan Fokus Solusi sebagai berikut:

Transformasi Pembiayaan & Kolaborasi: Mendorong skema pembangunan dan pengembangan perumahan berbasis komunitas. Solusi ini mengalihkan pola bantuan pasif menjadi partisipasi aktif masyarakat, sehingga pembangunan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Integrasi Penataan PSU: Penanganan kawasan kumuh tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan melalui integrasi penataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) secara menyeluruh (jalan, sanitasi, dan air minum) untuk memastikan penurunan angka kekumuhan yang permanen.

Akselerasi Stimulan RTLH: Meningkatkan intervensi perbaikan rumah tidak layak huni melalui program stimulan yang dikhususkan bagi KK MBR guna mengejar sisa target persentase rumah layak huni.

Digitalisasi Administrasi Pertanahan: Mempercepat pencapaian tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum lahan, sehingga penyediaan lahan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Melalui transparansi kinerja yang tersaji dalam laporan ini, Dinas berkomitmen untuk terus meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan mewujudkan pelayanan publik yang prima sesuai dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diharapkan. Laporan ini menjadi pijakan strategis bagi perencanaan di tahun mendatang guna mewujudkan permukiman yang layak, sehat, dan tertata secara berkelanjutan.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN mempunyai tugas :

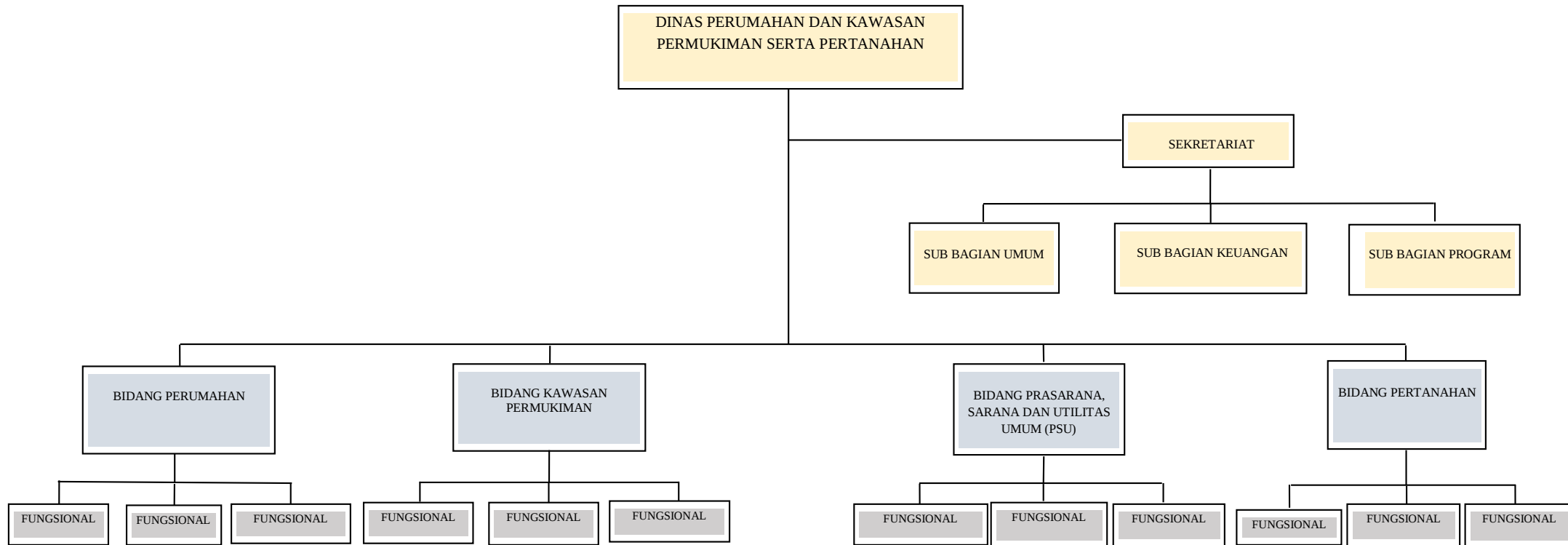
Membantu Bupati Deli Serdang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
4. Pembinaan teknis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN. Berikut bagan struktur organisasi DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN



Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 26 Tahun 2024

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN :

Tabel 1.1
Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun n-1	Rp 147.597.195.314
Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)		Rp 3.500.000.000
PAD	Tahun n	Rp 83.789.636.801
DAU		Rp 3.632.748.319
Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)		Rp 3.334.340.000
Insentif Fiskal		Rp 2.562.590.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2025

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 dan Rekomendasi LkjIP Tahun 2024

Berdasarkan Penyampaian Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Deli Serdang Tahun 2025 Nomor 700.1.2.1/LHE.AKIP.76.9/inisp/2025 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Tindak Lanjut atas Laporan hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 dan Rekomendasi LkjIP Tahun 2024

REKOMENDASI	KONSEP TINDAK LANJUT	TINDAK LANJUT
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan kabupaten Deli Serdang beserta seluruh jajarannya agar melakukan hal-hal sebagai berikut :		
Nilai Hasil Evaluasi Dalam Kisaran Angka Mulai 0 s.d 100, Dinas Perkimtan kab. Deli Serdang memperoleh Nilai 66,53. Dengan Nilai Hasil Evaluasi sebesar 66,53 maka Dinas Perkimtan Deli Serdang termasuk dalam kategori Penilaian “B” (Baik) Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam	Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan Kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang akuntabilitas kinerja internal, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, antara lain belum seluruhnya rekomendasi hasil evaluasi internal ditindaklanjuti dan diimplementasikan secara optimal, serta	Disperkimtan telah membuat Sebagai komitmen dalam menindaklanjuti hasil evaluasi Inspektorat, Dinas Perkimtan telah melakukan langkah-langkah strategis yang dimulai dari penguatan Perencanaan Kinerja. Kami telah melakukan penyesuaian dan penyelarasan (alignment) antara Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perjanjian Kinerja dengan dokumen Renstra yang telah diperbaiki. Penyelarasan ini kemudian diturunkan dalam bentuk penyusunan cascading

REKOMENDASI	KONSEP TINDAK LANJUT	TINDAK LANJUT
manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan samapai dengan level eselon 2/unit kerja. Meski sudah mendapat kategori baik, namun masih terdapat beberapa komponen yang harus diperbaiki. Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas perlu melakukan penguatan pada penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui penyempurnaan perencanaan kinerja, penajaman indikator dan target kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, dan PK), peningkatan kualitas pengukuran serta pelaporan kinerja, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data kinerja, serta konsistensi dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, diperlukan juga peningkatan koordinasi internal, pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja, serta penyampaian informasi	pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam perbaikan dan peningkatan efektivitas serta efisiensi kinerja perangkat daerah.	(pohon kinerja) yang lebih presisi, sehingga perencanaan kinerja tidak hanya menjadi dokumen administratif tetapi menjadi panduan nyata untuk mewujudkan hasil program yang berkesinambungan. Dalam aspek Pengukuran Kinerja, Dinas Perkimtan kini memperluas cakupan pemantauan hingga ke level individu untuk memastikan setiap pegawai berkontribusi langsung pada sasaran organisasi. Hasil pengukuran ini tidak lagi sekadar angka, melainkan telah dimanfaatkan sebagai dasar formal dalam pemberian reward and punishment serta penyesuaian strategi lapangan agar lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan prinsip transparansi pada poin Pelaporan Kinerja, kami telah mempublikasikan Laporan Kinerja (LKjIP) melalui website resmi Dinas agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Di dalam laporan tersebut, kami menyajikan target-target indikator yang lebih jelas dan terukur, di mana data capaian tersebut digunakan kembali sebagai bahan evaluasi untuk penyesuaian kebijakan pada periode berikutnya.

REKOMENDASI	KONSEP TINDAK LANJUT	TINDAK LANJUT
kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan secara lebih efektif dan akuntabel.		Terakhir, pada aspek Evaluasi Internal, Dinas Perkimtan secara aktif menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal guna meningkatkan implementasi SAKIP. Seluruh hasil evaluasi tersebut kami jadikan instrumen utama dalam melakukan perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja secara menyeluruh, sehingga setiap kendala yang ditemukan pada tahun berjalan dapat segera teratasi melalui perbaikan sistem dan prosedur yang lebih akuntabel.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN adalah mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan dan mewujudkan kawasan yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah
Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun	
					2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat	1.1	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase ketersediaan rumah layak huni terjangkau bagi masyarakat	-	40.95%
		1.2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh	-	0.30%
		1.3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kawasan permukiman	Persentase luas kawasan yang telah terfasilitasi dengan PSU	-	78.50%
2	Mewujudkan layanan pertanahan untuk kepentingan umum	2.1	Meningkatkan ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun	
					2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
				Persentase luasan tanah yang dibebaskan	100%	100%
3	Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85	82
4	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	87

Sumber : Renstra DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Periode 2025-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas hunian layak dan terjangkau	1.1	Persentase rumah tangga menempati rumah layak huni	presentasi	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah memiliki akses dan menempati hunian yang memenuhi standar teknis dan terfasilitasi PSU.	$\left(\frac{\text{Jumlah KK MBR yang Menempati RLH}}{\text{Total Jumlah KK MBR}} \right) \times 100\%$	DPKPP
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	2.1	Persentase luasan kawasan kumuh	Presentase	Luas wilayah yang telah tertangani di perkotaan/ keluarahan melalui Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 247 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Deli Serdang	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	DPKPP
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar perumahan	3.1	Persentase capaian pemenuhan PSU perumahan	Persentase	Tingkat ketersediaan dan keberfungsian Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (seperti jalan lingkungan, saluran pembuangan air) pada rumah MBR sesuai standar teknis.	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah Kabupaten/ Kota}} \times 100\%$	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
4	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	4.1	Persentase pemenuhan lahan untuk kepentingan umum	Persentase	Mengukur persentase penataan dan pemanfaatan tanah yang dibebaskan dibandingkan dengan penataan dan pemanfaatan tanah yang direncanakan	$\frac{\text{Jumlah Lokasi yang Dibebaskan}}{\text{Jumlah yang Direncanakan}} \times 100\%$	
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	Pengukuran kepuasan masyarakat atas pelayanan publik		DPKPP
		5.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	poin	Pengukuran kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		Inspektorat Kabupaten

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Tahun 2025

2.2 Rencana Kinerja Tahun n

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun n DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat	1.1 Meningkatkan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase ketersediaan rumah layak huni terjangkau bagi masyarakat	Persentase	40,95%
		1.2 Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase	0,30%
		1.3 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kawasan permukiman	Persentase luas kawasan yang telah terfasilitasi dengan PSU	Persentase	78,50%
2	Mewujudkan layanan pertanahan untuk kepentingan umum	2.1 Meningkatkan ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase ketersediaan tanah untuk kepentingan umum	Persentase	100%
			Persentase luasan tanah yang dibebaskan	Persentase	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.1 Meningkatkan Kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	82 Nilai
	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	87 Poin

Sumber : Rencana Kerja Perubahan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni	40,95%
2	Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase areal kawasan permukiman kumuh	0,30%
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman yang difasilitasi PSU	78,50%
4	Meningkatnya layanan pertanahan untuk kepentingan umum	Persentase cakupan layanan pertanahan untuk kepentingan umum	62,50%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Poin
		Nilai LHE AKIP	82 Nilai

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan merupakan komitmen kinerja antara pimpinan instansi dengan atasan langsung yang memuat sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi pedoman dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih fokus, terukur, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Melalui PK tersebut, perangkat daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas sehingga seluruh kegiatan berjalan efektif dan berkontribusi pada peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, pada pertengahan tahun 2025 dilakukan perubahan PK seiring terjadinya pergantian pimpinan dan penyesuaian

terhadap kondisi fiskal daerah. Perubahan ini terutama berdampak pada target penanganan kawasan permukiman kumuh yang mengalami penyesuaian (pengecilan) target. Penurunan target tersebut mempertimbangkan berkurangnya alokasi anggaran dinas, sehingga strategi pencapaian kinerja diselaraskan dengan kemampuan pendanaan yang tersedia tanpa mengurangi komitmen peningkatan kualitas permukiman. Dengan adanya PK Perubahan ini, diharapkan pelaksanaan program tetap realistis, akuntabel, dan tetap mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah secara optimal.

Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni	40,95%
2	Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase areal kawasan permukiman kumuh	0,11%
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman yang difasilitasi PSU	78,50%
4	Meningkatnya layanan pertanahan untuk kepentingan umum	Persentase cakupan layanan pertanahan untuk kepentingan umum	62,50%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Poin
		Nilai LHE AKIP	82 Nilai

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Tahun 2025

Pada pertengahan tahun 2025 dilakukan Perjanjian Kinerja Perubahan seiring adanya periode kepemimpinan baru serta penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah. Salah satu perubahan signifikan terdapat pada target persentase areal kawasan permukiman kumuh yang disesuaikan dari semula 0,30% menjadi 0,11%. Penyesuaian ini mempertimbangkan berkurangnya alokasi anggaran dinas, sehingga target kinerja ditetapkan lebih realistis sesuai kapasitas pendanaan yang tersedia. Meskipun terjadi penurunan target, perangkat daerah tetap berkomitmen melaksanakan upaya penanganan kawasan kumuh secara optimal dan akuntabel guna mendukung peningkatan kualitas permukiman di daerah.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN :

Tabel 2.6
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87
		Nilai LHE AKIP	82
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja	100%
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi dan pelaporan keuangan	100%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	410 Orang/ Bulan
1.2.2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen
1.2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pelaporan penatausahaan	100%
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
1.4	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat disiplin aparatur/ pegawai	100%
1.4.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.2	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	40 Dokumen
1.5	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum kedinasan	100%
1.5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
1.5.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket
1.4.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket
1.4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket
1.4.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen
1.4.6	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan
1.4.7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan
1.5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarpras penunjang fungsi kedinasan	100%
1.5.1	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	1 unit
1.5.2	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	1 Unit

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
1.6	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan dan kenyamanan kantor	100%
1.6.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
1.6.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
1.7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset/ barang yang terpelihara fungsinya	100%
1.7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit
1.7.3	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit
1.7.4	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	42 unit
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah korban	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		bencana/relokasi program Kabupaten	
2.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya data rumah bagi korban bencana alam dan relokasi program kabupaten/kota	37%
2.1.1	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	4 Dokumen
2.1.2	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	6 dokumen
2.2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pemahaman masyarakat / sukarelawan terhadap materi sosialisasi	100%
2.2.1	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	20 Orang
2.3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Layak Huni yang terbangun bagi korban bencana alam	100%
2.3.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten yang Terehabilitasi	90 unit rumah

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.3.2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi korban bencana Kabupaten/ Kota yang terbangun	30 unit rumah
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan permukiman kumuh	0,3%
3.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	19,58%
3.1.1	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen
3.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase penataan kawasan permukiman kumuh	16,67%
3.2.1	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman KUMUH	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen
3.2.2	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	19.71 Ha
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni terjangkau bagi masyarakat	61.18%
4.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	3.35%
4.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	110 Unit

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	
4.1.2	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	130 Unit
4.1.3	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	3 Laporan
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU memadai di kawasan perumahan dan permukiman	84.5%
5.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	81%
5.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen
5.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 Lokasi
5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana,	1 Laporan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		dan Utilitas Umum Perumahan	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pemenuhan kebutuhan tanah untuk kepentingan umum	50%
6.1	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase ketersediaan data lahan dan lahan untuk kepentingan umum	100%
6.1.1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah laporan tanah kosong dalam 1 (satu) kabupaten/ Kota yang diinventarisasi	9 Laporan
6.1.2	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah dokumen pemanfaatan tanah kosong	9 Dokumen

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

3.1.2 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Tahun Pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun n

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni	40,95%	40.32%	98,46 %	Sangat Tinggi	DPKPP
2	Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase areal kawasan permukiman kumuh	0,11%	0,117%	100	Sangat Tinggi	DPKPP
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman yang difasilitasi PSU	78,50%	78,50%	100	Sangat Tinggi	DPKPP
4	Meningkatnya layanan pertanahan untuk kepentingan umum	Persentase cakupan layanan pertanahan untuk kepentingan umum	100%	100%	100%	Sangat tinggi	DPKPP
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Poin	90,25	100	Sangat tinggi	DPKPP
		Nilai LHE AKIP	82 Nilai	66,53 Nilai	81,13	Tinggi	Inspektorat Kabupaten

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang memiliki 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator yang harus dicapai. Dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan masuk ke dalam kategori capaian sedang sampai dengan sangat tinggi.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022-2025 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)			Keterangan
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman yang layak dan aman	Persentase areal kawasan kumuh	0,158						Indikator sudah tidak digunakan untuk tahun n
		Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU	67,25						Indikator sudah tidak digunakan untuk tahun n
		Persentase Rumah Tangga dengan akses terhadap hunian layak dan terjangkau	-	100% 98,24% 98,24% 71,53%	100% 17,30% 97,24 % 89,17%				Indikator sudah tidak digunakan untuk tahun n
2	Meningkatnya Penataan dan Pemanfaatan tanah	Persentase penataan dan pemanfaatana tanah	100	100% 100%	42,50% 75,00%				Indikator sudah tidak digunakan untuk tahun n

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)			Keterangan
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni				40,95%	40,32%	98,46 %	Sangat Tinggi
4	Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase areal kawasan permukiman kumuh				0,11%	0,117%	94,02%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman yang difasilitasi PSU				78,50%	78,50%	100%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya layanan pertanahan untuk kepentingan umum	Persentase cakupan layanan pertanahan untuk kepentingan umum				100%	100%	100%	Sangat tinggi
7	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	73,02	73,72 Nilai	65,72 Nilai	82 Nilai	90,25	100	Sangat tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,86	87,11 Poin	87,29 Poin	87 Poin	66,53 Nilai	81,13	Tinggi

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berdasarkan tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan mengalami peningkatan dan penurunan. Salah satu indikator yang mengalami penurunan capaian kinerja yaitu persentase rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak dan terjangkau. Hal ini disebabkan salah satu kriteria yang capaiannya tidak memenuhi target, yaitu program Kawasan Permukiman.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN periode 2024-2025 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni	40,32%	40,95%	Sangat Tinggi
2	Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase areal kawasan permukiman kumuh	0,117%	0,11%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman yang difasilitasi PSU	78,50%	78,50%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya layanan pertanahan untuk	Persentase cakupan layanan pertanahan	2,16%	62,50%	Rendah

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
	kepentingan umum	untuk kepentingan umum			
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,25 Poin	87 Poin	Sangat tinggi
		Nilai LHE AKIP	66,53 Nilai	82 Nilai	Tinggi

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 terhadap target akhir tahun RPJMD sudah mencapai di atas 80%. Artinya menjelang akhir periode berakhirnya RPJMD diharapkan semuanya mencapai target akhir RPJMD, terutama pada indikator persentase areal kawasan kumuh dan nilai LHE AKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni	40.32%	74,36%	54,22%
2	Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase areal kawasan permukiman kumuh	0,117%	-	-
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman yang difasilitasi PSU	78,50%	-	-
4	Meningkatnya layanan pertanahan untuk kepentingan umum	Persentase cakupan layanan pertanahan untuk kepentingan umum	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,25 Poin	89,72 Poin	100%
		Nilai LHE AKIP	66,53 Nilai	72 Nilai	92,40%

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Utara

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni	40,95%	40.32%	98,46 %	Capaian mencapai 98,46% (Target 40,95%; Realisasi 40,32%). Meskipun hampir mencapai target, terdapat selisih tipis yang menunjukkan adanya hambatan kecil dalam penyelesaian fisik atau validasi data rumah layak huni.	Melakukan verifikasi lapangan yang lebih ketat dan mempercepat proses administrasi bantuan stimulan perumahan agar serah terima hasil dapat dilakukan tepat waktu sesuai jadwal perencanaan.
2	Menurunnya luasan kawasan	Persentase areal kawasan	0,11%	0,117%	94,02%	Capaian sebesar 94,02%. Realisasi luas kawasan	Meningkatkan kolaborasi lintas

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	permukiman kumuh	permukiman kumuh				kumuh berada di angka 0,117% dari target 0,11%. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi pengurangan luas kumuh belum sepenuhnya mencakup seluruh area yang direncanakan pada tahun berjalan.	sektor untuk integrasi infrastruktur di kawasan kumuh serta mengevaluasi kembali efektivitas program pemugaran lingkungan.
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman yang difasilitasi PSU	78,50%	78,50%	100%	Capaian sempurna 100% (Target dan Realisasi 78,50%). Ini menunjukkan keberhasilan dalam distribusi dan fasilitasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.	Mempertahankan standar operasional prosedur yang ada dan mulai fokus pada pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun agar manfaatnya dirasakan jangka

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							panjang oleh masyarakat.
4	Meningkatnya layanan pertanahan untuk kepentingan umum	Persentase cakupan layanan pertanahan untuk kepentingan umum	100%	100%	100%	Tercapainya target 100% pada indikator "Persentase cakupan layanan pertanahan untuk kepentingan umum" menunjukkan bahwa seluruh tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan fisik di daerah telah terlaksana sesuai dokumen perencanaan.	Memperkuat sistem pengarsipan digital untuk seluruh warkah atau dokumen pertanahan agar aksesibilitas data untuk kepentingan umum menjadi lebih cepat dan aman (menjawab rekomendasi publikasi laporan)
5	Meningkatnya kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	90,25 Nilai	100 Nilai	Berhasil melampaui target dengan capaian 100%	Fokus pada penguatan cascading

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	87 Poin	66,53 Nilai	81,13 Poin	(Realisasi 90,25 dari target 82). Ini menunjukkan persepsi publik yang sangat positif terhadap layanan Dinas. Capaian sebesar 81,13% (Target 87 Poin; Realisasi 66,53 Nilai). Ini menunjukkan sistem akuntabilitas masih perlu perbaikan serius, searah dengan catatan Inspektorat mengenai belum ditindaklanjutnya beberapa poin SAKIP.	kinerja hingga level individu dan memastikan seluruh rekomendasi Inspektorat segera dipenuhi untuk mendongkrak nilai AKIP pada periode evaluasi berikutnya.

Berdasarkan uraian tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) indikator yang persentase capaiannya di bawah 100%, namun masih tergolong tinggi. Indikator tersebut adalah bagian dari persentase rumah

tangga dengan akses terhadap hunian layak dan terjangkau, persentase penataan dan pemanfaatan tanah, serta persentase dan nilai AKIP, sehingga perlu tindak lanjut dan solusi yang akan dilakukan pada rencana kerja tahun berikutnya.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	40,95%	40.32%	98,46 %	28.895.065.510	25.571.423.323	88,50%	-
2	Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh	0,11%	0,117%	94,02%	3.605.551.900	3.341.596.317	92,68%	-

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman	78,50%	78,50%	100%	19.668.042.034	18.633.839.189	94,74%	-
4	Meningkatnya layanan pertanahan untuk kepentingan umum	100%	100%	100%	29.520.527.206	6.746.717.316	22,85%	-
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	82 Nilai	90,25 Nilai	100 Nilai	12.011.647.750	8.658.788.501	72,09%	-
		87 Poin	66,53 Nilai	81,13Poin				

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja dapat berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran yang tersedia. Rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 91,55% dan termasuk dalam kategori tinggi. Realisasi anggaran yang capaiannya dibawah 70% dikarenakan melaksanakan pengadaan tanah yang menyerap anggaran lebih efektif dan efisien.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak menunjang	Analisis
(1)			(2)		(5)		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		72,09	Menunjang	
1.1		Nilai LHE AKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja	54,99	Menunjang	
1.1.1			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93,51	Menunjang	
1.1.2			Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	28,91	Menunjang	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak menunjang	Analisis
(1)			(2)		(5)		
			capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
1.2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	74,03	Menunjang	
1.2.1			Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	74,91	Menunjang	
1.2.2			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61,68	Menunjang	
1.2.3			Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	96,22	Menunjang	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak menunjang	Analisis
(1)			(2)		(5)		
			keuangan akhir tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
1.3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah	49,81	Menunjang	
1.3.1			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	49,81	Menunjang	
1.4			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur/ Pegawai	92,18	Menunjang	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak menunjang	Analisis
(1)			(2)		(5)		
1.4.1			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	97,85	Menunjang	
1.4.2			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	86,00	Menunjang	
1.5			Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Kedinasan	58,61	Menunjang	
1.5.1			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	96,61	Menunjang	
1.5.2			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	98,17	Menunjang	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak menunjang	Analisis
(1)			(2)		(5)		
				Kantor yang Disediakan			
1.5.3			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	92,02	Menunjang	
1.5.4			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	81,59	Menunjang	
1.5.5			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	85,10	Menunjang	
1.5.6			Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	17,52	Menunjang	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak menunjang	Analisis
(1)			(2)		(5)		
1.5.7			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31,44	Menunjang	
1.6			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarpras penunjang fungsi kedinasan	95,50	Menunjang	
1.6.1			Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	87,42	Menunjang	
1.6.2			Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	98,28	Menunjang	
1.6.3			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	98,31	Menunjang	
1.7			Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan dan	69,43	Menunjang	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak menunjang	Analisis
(1)			(2)		(5)		
				kenyamanan kantor			
1.7.1			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60,45	Menunjang	
1.7.2			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	74,28	Menunjang	
1.8			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset/ barang yang terpelihara fungsinya	68,26	Menunjang	
1.8.1			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49,05	Menunjang	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak menunjang	Analisis
(1)			(2)		(5)		
1.8.3			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33,27	Menunjang	
1.8.2			Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	98,91	Menunjang	
1.8.4			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	86,18	Menunjang	
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah korban bencana/ relokasi program Kabupaten	38,71	Menunjang	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak menunjang	Analisis
(1)			(2)		(5)		
2.1			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya data rumah bagi korban bencana alam dan relokasi program kabupaten/kota	91,85	Menunjang	
2.1.2			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	52,31	Menunjang	
2.1.1			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	92,82	Menunjang	
2.2			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya rumah bagi korban bencana alam dan relokasi	16,26	Menunjang	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak menunjang	Analisis
(1)			(2)		(5)		
				program kabupaten			
2.2.1			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	29,75	Menunjang	
2.2.2			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0	Tidak Menunjang	Tidak ada laporan rumah terdampak bencana dalam kondisi rusak berat
2.3			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		0	Tidak Menunjang	Studi kajian belum dapat dilaksanakan
2.3.1			Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		0	Tidak Menunjang	Studi kajian belum dapat dilaksanakan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak menunjang	Analisis
(1)			(2)		(5)		
3	Menurunya luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase areal kawasan permukiman kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan permukiman kumuh	92,68	Menunjang	
3.1			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase penataan kawasan permukiman kumuh	16,42	Menunjang	
3.1.1			Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	16,42	Menunjang	
3.2			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	93,77	Menunjang	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak menunjang	Analisis
(1)			(2)		(5)		
3.2.1			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	91,40	Menunjang	
3.2.2			Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	94,05	Menunjang	
4			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni terjangkau bagi masyarakat	95,92	Menunjang	
4.1			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat	95,92	Menunjang	
4.1.1			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	99,01	Menunjang	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak menunjang	Analisis
(1)			(2)		(5)		
			untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			
4.1.2			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	90,86	Menunjang	
4.1.3			Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh	67,63	Menunjang	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak menunjang	Analisis
(1)			(2)		(5)		
5	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman yang difasilitasi PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU memadai di kawasan perumahan dan permukiman	94,74	Menunjang	
5.1			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase ketersediaan PSU perumahan dan permukiman	94,74	Menunjang	
5.1.1			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	91,27	Menunjang	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak menunjang	Analisis
(1)			(2)		(5)		
5.1.2			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	95,78	Menunjang	
5.1.3			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	93,67	Menunjang	
6	Meningkatnya layanan pertanahan untuk kepentingan umum	Persentase cakupan layanan pertanahan untuk kepentingan umum	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase pemenuhan kebutuhan tanah untuk kepentingan umum	22,85	Menunjang	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /Tidak menunjang	Analisis
(1)			(2)		(5)		
6.1			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase ketersediaan data lahan dan lahan untuk kepentingan umum	22,85	Menunjang	
6.1.1			Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	63,55	Menunjang	

Sumber : Laporan Evaluasi Renja TW IV Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Tahun 2025

Berdasarkan uraian tabel yang telah disebutkan di atas, Berikut Sektor yang merupakan kontributor utama keberhasilan instansi dalam menjawab isu strategis kawasan kumuh dan hunian layak:

- Keberhasilan Pencegahan Kumuh: Program Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh mencatatkan capaian 95,92%, didorong oleh perbaikan RTLH (99,01%) dan pembangunan rumah baru (90,86%).
- Pemenuhan Infrastruktur Dasar: Program Peningkatan PSU menunjukkan kinerja konsisten sebesar 94,74%, yang secara langsung menunjang sasaran meningkatnya infrastruktur dasar kawasan permukiman.
- Penanganan Kawasan Kumuh: Program Kawasan Permukiman (92,68%) dinilai sangat menunjang sasaran penurunan luasan kumuh melalui peremajaan fisik.
- Penyelarasan AKIP dan IKM: Program Penunjang (72,09%) secara umum menunjang kinerja perangkat daerah. Namun, terdapat catatan pada Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (28,91%) dan Administrasi Barang Milik Daerah (49,81%) yang masih rendah, sehingga berpotensi menghambat penilaian Nilai LHE AKIP yang maksimal.
- Penyediaan Lahan (Sektor Pertanahan): Program Pengelolaan Tanah Kosong hanya mencapai 22,85%. Meskipun dinyatakan "Menunjang", angka rendah ini menunjukkan hambatan serius dalam pemenuhan lahan untuk kepentingan umum yang merupakan sasaran strategis ke-6.
- Respon Bencana: Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana (0%) dinyatakan "Tidak Menunjang". Analisis menunjukkan hal ini terjadi karena tidak adanya laporan rumah rusak berat yang memerlukan intervensi pembangunan baru pada periode tersebut.

- Kajian Teknis: Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun (0%) belum menunjang sasaran karena studi kajian yang belum dapat dilaksanakan, menandakan perlunya perbaikan dalam tahap perencanaan awal.

Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	12.011.647.750	8.658.788.501	72,09
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	290.215.250	159.580.300	54,99
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	117.168.625	109.560.275	93,51
1.1.2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	173.046.625	50.020.025	28,91
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.857.672.805	5.076.586.436	74,03
1.2.1	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	6.306.388.319	4.724.106.136	74,91
1.2.2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	515.283.986	317.841.300	61,68
1.2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	36.000.500	34.639.000	96,22
1.3	Administrasi Barang Milik	51.796.800	25.801.900	49,81

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Daerah pada Perangkat Daerah			
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	51.796.800	25.801.900	49,81
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.678.110	91.884.500	92,18
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	52.000.000	50.882.400	97,85
1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	47.678.110	41.002.100	86,00
1.5	Administrasi umum perangkat daerah	1.086.758.319	636.947.972	58,61
1.5.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11.954.760	11.550.000	96,61
1.5.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	285.439.950	280.219.851	98,17
1.5.3	Penyediaan bahan logistik kantor	65.240.821	60.031.900	92,02
1.5.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	75.375.480	61.499.600	81,59
1.5.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	54.383.256	46.278.605	85,10
1.5.6	Fasilitas kunjungan tamu	68.083.052	11.930.500	17,52
1.5.7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	526.281.000	165.437.516	31,44
1.6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	644.016.139	615.059.000	95,50
1.6.1	Pengadaan mebel	165.794.224	144.929.300	87,42

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.6.2	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	82.221.915	80.808.000	98,28
1.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	396.000.000	389.321.700	98,31
1.7	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	1.520.770.527	1.055.845.407	69,43
1.7.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	533.064.107	322.222.345	60,45
1.7.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	987.706.420	733.623.062	74,28
1.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	1.460.739.800	997.082.986	68,26
1.8.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	801.910.800	393.310.181	49,05
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.494.000	21.789.000	33,27
1.8.2	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	555.185.000	549.107.305	98,91
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.150.000	32.876.500	86,18
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.746.824.600	1.450.323.994	38,71

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.134.194.600	1.041.702.242	91,85
2.1.2	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	27.252.600	14.257.000	52,31
2.1.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.106.942.000	1.027.445.242,	92,82
2.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.512.630.000	408.621.752	16,26
2.2.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.373.440.000	408.621.752	29,75
2.2.2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.139.190.000	0	0
2.3	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100.000.000	0	0
2.3.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	100.000.000	0	0
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.605.551.900	3.341.596.317	92,68
3.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan	51.010.000	8.376.000	16,42

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
3.1.1	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	51.010.000	8.376.000	16,42
3.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.554.541.900	3.333.220.317	93,77
3.2.1	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	377.364.000	344.926.580	91,40
3.2.2	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	3.177.177.900	2.988.293.737	94,05
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	25.148.240.910	24.121.099.329	95,92
4.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	25.148.240.910	24.121.099.329	95,92
4.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	16.367.835.360	16.205.089.688	99,01

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.1.2	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	8.515.155.550	7.736.633.641	90,86
4.1.3	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	265.250.000	179.376.000	67,63
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	19.668.042.034	18.633.839.189	94,74
5.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	19.668.042.034	18.633.839.189	94,74
5.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.568.450.994	1.431.491.869	91,27
5.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	11.757.016.040	11.260.981.824	95,78
5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	6.342.575.000	5.941.365.496	93,67
6	Program Pengelolaan Tanah Kosong	29.520.527.206	6.746.717.316	22,85
6.1	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	29.520.527.206	6.746.717.316	22,85

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.1.1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	659.464.140	419.072.560	63,55
6.1.2	Pemanfaatan Tanah Kosong	28.861.063.066	6.327.644.756	21,92
	Jumlah	93.700.834.400	62.952.364.646	67,18

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat tiga program utama yang menunjukkan efektivitas penyerapan anggaran sangat baik, yang berkorelasi langsung dengan upaya pencegahan kumuh dan pemenuhan infrastruktur:

- a. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (95,92%): Fokus pada perbaikan RTLH (99,01%) menunjukkan komitmen yang sangat kuat dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
- b. Program Peningkatan PSU (94,74%): Penyelenggaraan sarana dan utilitas perumahan berjalan hampir sesuai target, mendukung fungsi hunian secara optimal.
- c. Program Kawasan Permukiman (92,68%): Menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan peremajaan kawasan kumuh fisik.
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan (72,09%): Administrasi keuangan dan gaji berjalan stabil, namun terdapat efisiensi pada pos rapat koordinasi dan fasilitas kunjungan tamu yang penyerapannya cukup rendah (di bawah 32%).

Ini merupakan titik krusial yang perlu mendapatkan catatan dalam laporan:

- a. Program Pengelolaan Tanah Kosong (22,85%): Rendahnya serapan pada pemanfaatan tanah kosong menunjukkan adanya kendala teknis atau administratif dalam proses pengadaan/pemanfaatan lahan yang sangat signifikan.

- b. Program Pengembangan Perumahan (38,71%): Penyerapan rendah ini dipicu oleh tidak terealisasinya Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana (0%), yang menandakan adanya hambatan besar dalam pelaksanaan fisik atau perencanaan pada sektor ini.

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas, langkah yang perlu diambil adalah:

- a. Evaluasi Program Pertanahan: Mengingat serapan hanya 22,85%, perlu dilakukan revisi metodologi pemanfaatan lahan agar sisa anggaran yang besar tidak menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang tidak produktif di tahun mendatang.
- b. Akselerasi Rumah Korban Bencana: Segera mengidentifikasi penyebab nol realisasi pada pembangunan rumah korban bencana (apakah kendala lahan, regulasi, atau kegagalan lelang) untuk memastikan perlindungan sosial terpenuhi.
- c. Optimalisasi Belanja Penunjang: Meninjau kembali perencanaan anggaran rapat dan koordinasi (1.5.7) agar lebih akurat, mengingat realisasinya hanya 31,44%, guna menghindari pengalokasian anggaran yang berlebihan pada pos non-fisik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan telah terealisasi.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN adalah kurangnya capaian kinerja dalam menangani kawasan kumuh di Kabupaten Deli Serdang merupakan tanggung jawab bersama dengan perangkat daerah lainnya.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan kecamatan, desa/kelurahan, provinsi, perangkat daerah yang tergabung dalam Pokja PKP untuk mengurangi luasan kawasan kumuh secara komprehensif.
2. Menyusun anggaran secara efektif termasuk di dalamnya anggaran dengan Lintas Perangkat Daerah untuk mencapai target indikator kinerja.
3. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terhadap capaian kinerja saat ini dan target capaian kinerja yang harus dikejar.
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Lubuk Pakam, Maret 2026
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN DELI SERDANG



YETTY SEMBIRING, S.STP, M.M
NIP. 19790528 199803 2 003

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUPARNO, S.Sos., MSP**
Jabatan : **Pt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ASRI LUDIN TAMBUNAN**
Jabatan : **BUPATI DELI SERDANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuk Pakam, Juli 2025

Pihak Kedua,

ASRI LUDIN TAMBUNAN

Pihak Pertama,

SUPARNO, S.Sos., MSP
NIP. 19710704 199801 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN DELI SERDANG

No.	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni	40,95%
2.	Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase areal kawasan permukiman kumuh	0,11%
3.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman yang difasilitasi PSU	78,50%
4.	Meningkatnya layanan pertanahan untuk kepentingan umum	Persentase cakupan layanan pertanahan untuk kepentingan umum	62,50%
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Nilai LHE AKIP	87 Poin 75 Nilai

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pengembangan Perumahan	3.846.824.600	P-APBD
2.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	24.771.100.910	P-APBD
3.	Program Kawasan Permukiman	5.421.405.210	P-APBD
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	19.668.042.034	P-APBD
5.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	27.737.032.896	P-APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.879.288.750	P-APBD

Lubuk Pakam, Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Serta Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang


Kabupaten Deli Serdang
ASRI LUDIN TAMBUNAN


SUPARNO, S.Sos., MSP
NIP. 19710704 199801 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit Kerja : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

Tugas : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
4. Pembinaan teknis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formula Perhitungan	Target 2025	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	40,95%	Dinas Perkintan	Kepala Dinas Perkintan
2.	Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase areal kawasan permukiman kumuh	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh}}{\text{Luas kawasan Kabupaten Deli Serdang}} \times 100\%$	0,11%	Dinas Perkintan	Kepala Dinas Perkintan
3.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman yang difasilitasi PSU	$\frac{\text{Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU}}{\text{Jumlah seluruh perumahan}} \times 100\%$	78,50%	Dinas Perkintan	Kepala Dinas Perkintan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formula Perhitungan	Target 2025	Sumber Data	Penanggung Jawab
4.	Meningkatnya layanan pertanahan untuk kepentingan umum	Persentase cakupan layanan pertanahan untuk kepentingan umum	$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan untuk pembangunan kepentingan umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan kepentingan umum}} \times 100\%$	62,50%		
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai hasil survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	87 Poin	Dinas Perkintan	Kepala Dinas Perkintan
		Nilai LHE AKIP	Nilai yang diperoleh dari 4 indikator yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	75 Nilai	Inspektorat	Kepala Dinas Perkintan

Lubuk Pakam, Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang



SUPARNO, S.Sos., MSP
NIP. 19710704 199801 1 002

Lampiran 2 Pemanfaatan aplikasi e-SAKIP dan Pakde dalam Pengumpulan data kinerja serta monitoring dan evaluasi berkala

Pohon Kinerja & Cascading

Upload Doc

Tahun:

Show: 10 4 entries

No	Username	Unit Kerja	Tgl Upload	Dokumen	Keterangan	Aksi	Tanggapan
1	perkinsubuloharung	Desa Pemukiman dan Kawasan Permukiman serta Perikanan	30 Mei 2025 14:31		CASCADE KINERJA 2025		
2	perkinsubuloharung	Desa Pemukiman dan Kawasan Permukiman serta Perikanan	30 Mei 2025 14:31		Pohon Kinerja PERUM 2025		

Showing 1 to 2 of 2 entries

Posisi: 1 100

Renstra

Upload Doc

Tahun:

Show: 10 4 entries

No	Username	Unit Kerja	Tgl Upload	Dokumen	Keterangan	Aksi	Tanggapan
1	perkinsubuloharung	Desa Pemukiman dan Kawasan Permukiman serta Perikanan	27 Mei 2025 15:20		RA Renvi Renstra 2019-2024		
2	perkinsubuloharung	Desa Pemukiman dan Kawasan Permukiman serta Perikanan	27 Mei 2025 15:20		Renstra Perikanan 2019-2024		
3	perkinsubuloharung	Desa Pemukiman dan Kawasan Permukiman serta Perikanan	27 Mei 2025 15:20		Renstra 2019-2024		
4	perkinsubuloharung	Desa Pemukiman dan Kawasan Permukiman serta Perikanan	02 Mei 2025 14:29		RENSTRA 2025-2028		

Showing 1 to 4 of 4 entries

Posisi: 1 100

Renja/RKT

Upload Doc

Tahun:

Show: 10 4 entries

No	Username	Unit Kerja	Tgl Upload	Dokumen	Keterangan	Aksi	Tanggapan
1	perkinsubuloharung	Desa Pemukiman dan Kawasan Permukiman serta Perikanan	29 Mei 2025 14:08		Renja Perubahan Desa Perikanan Tahun 2024		
2	perkinsubuloharung	Desa Pemukiman dan Kawasan Permukiman serta Perikanan	14 Mei 2025 12:32		Revisi Akta Koperasi Desa Perikanan Tahun 2024		
3	perkinsubuloharung	Desa Pemukiman dan Kawasan Permukiman serta Perikanan	14 Mei 2025 12:29		Renja Desa Perikanan Tahun 2024		
4	perkinsubuloharung	Desa Pemukiman dan Kawasan Permukiman serta Perikanan	13 Mei 2025 10:58		Renja Desa Perikanan 2025		

Showing 1 to 4 of 4 entries

Posisi: 1 100

E-SAKIP

Rencana Tahunan

Peringkat Daerah: > Tahunan > Data

Rencana Tahunan

Peringkat Daerah: (Pilih Peringkat Daerah)

2020 - 2024

2020 2021 2022 2023 2024

Target 2025

Tahun 2025

Kode	Uraian	Target
1.1.1	Kawasan: Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. (KPI)	80.00
1.1.1.1	Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (KPI)	80.00
1.1.1.2	Kawasan: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dari kualitas pelayanan Perangkat Daerah	100.00
1.1.1.1.01	Indikator Kinerja: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	70.00
1.1.1.1.02	Indikator Kinerja: Indeks Manajemen Risiko (IMR)	0.00
1.1.1.1.03	Indikator Kinerja: Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80.00
1.1.1.1.1	Program: PROGRAM Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas	70.00
1.1.1.1.1.01	Indikator Program: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	70.00
1.1.1.1.1.02	Indikator Program: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0.00

E-SAKIP

Rencana Tahunan

Peringkat Daerah: > Tahunan > Data

Rencana Tahunan

Peringkat Daerah: (Pilih Peringkat Daerah)

2020 - 2024

2020 2021 2022 2023 2024

Target 2025

Tahun 2025

Kode	Uraian	Target
1.1.1	Kawasan: Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. (KPI)	80.00
1.1.1.1	Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (KPI)	80.00
1.1.1.2	Kawasan: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dari kualitas pelayanan Perangkat Daerah	100.00
1.1.1.1.01	Indikator Kinerja: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	70.00
1.1.1.1.02	Indikator Kinerja: Indeks Manajemen Risiko (IMR)	0.00
1.1.1.1.03	Indikator Kinerja: Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80.00
1.1.1.1.1	Program: PROGRAM Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas	70.00

E-SAKIP

Rencana Aksi (RENAKSI)

Peringkat Daerah: > Tahunan > Data

Rencana Aksi (RENAKSI)

Peringkat Daerah: (Pilih Peringkat Daerah)

2020 - 2024

2020 2021 2022 2023 2024

Target 2025

Kode	Uraian	HC	Indikator	Anggaran	Resor	Tahun 2025	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1.1.1	Kawasan: Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. (KPI)			Rp. 0						
1.1.1.1	Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (KPI)				90.00					
1.1.1.2	Kawasan: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dari kualitas pelayanan Perangkat Daerah			Rp. 0						
1.1.1.1.1	Indikator Kinerja: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				70.00					
1.1.1.1.2	Indikator Kinerja: Indeks Manajemen Risiko (IMR)				0.00					
1.1.1.1.3	Indikator Kinerja: Nilai Survey Kepuasan Masyarakat				80.00					
1.1.1.1.1.1	Program: PROGRAM Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas			Rp. 0						
1.1.1.1.1.1.1	Indikator Program: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				0.00					
1.1.1.1.1.1.2	Indikator Program: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				0.00					

Lampiran 3 Penyampaian Hasil Akip 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**
INSPEKTORAT
Jalan Mayor Nomor 6 Lubuk Pakam Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 20554
Telepon (061) 7951648 Faksimili (061) 7951648
Fax (01) 7951648 Email: inspektat@deliserdang.go.id Website: www.inspektat@deliserdang.go.id

Lubuk Pakam, 05 Juli 2025

Nomor: TSD/1.5.1/URE/INP/16.5/KSP/2025
Sifat: -
Lampiran: -
Perihal: Penyampaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Deli Serdang Tahun 2025

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang

di-
Lubuk Pakam

Tim Evaluasi telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dengan berpedoman pada Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Deli Serdang Nomor: 800.1.11.1/GD/2025 tanggal 08 April 2025.

b. Latar Belakang Evaluasi

Pengukuran akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang cakap, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, perlu diketahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan

Lampiran Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan Deli Serdang

1

Dipindai dengan CamScanner

berorientasi pada hasil, perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi pelaksanaan SAKIP di setiap instansi pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang direncanakan. Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government).

Sasaran evaluasi AKIP adalah:

- 1) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjalan, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atau output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

e. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

f. Gambaran Urutan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kadukban, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretaris, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum;

Lampiran Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan Deli Serdang

2

Dipindai dengan CamScanner

- b) Sub Bagian Keuangan;
- c) Sub Bagian Program;
- 3) Bidang Perumahan, membawahi Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Kawasan Permukiman, membawahi Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), membawahi Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Pertanian, membawahi Jabatan Fungsional

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah.

Implementasi SAKIP organisasi perangkat daerah dievaluasi oleh tim evaluator dimana evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi tahun 2024, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), IKU, Rencana Aksi serta dokumen keterkaitannya.

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Bersama dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, Inspektoral Kabupaten Deli Serdang juga memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanian sebagai berikut:

No.	Rekomendasi Inspektoral	Tindak Lanjut
a) Perencanaan Kinerja		
1.	Menetapkan target indikator sasaran menengahnya indikator dasar permukiman yang layak dan aman serta menengahnya penataan dan pemanfaatan tanah pada Renstra.	Telah ditindaklanjuti
2.	Menyusun indikator kinerja pada PK, RKT, dan Rencana Aksi dengan indikator kinerja pada Renstra.	Telah ditindaklanjuti
3.	Menetapkan target indikator kinerja yang jelas, dapat diukur dan dapat dicapai sesuai dengan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound (SMART) pada seluruh dokumen perencanaan.	Telah ditindaklanjuti
4.	Menyusun Program pada PK dengan program yang tercantum dalam Renstra.	Telah ditindaklanjuti
5.	Menyusun Renstra yang telah diperbaiki dalam penyusunan cascading.	Belum ditindaklanjuti
6.	Memanfaatkan perencanaan kinerja untuk mengaitkan hasil yang berkesinambungan.	Belum ditindaklanjuti
b) Pengukuran Kinerja		
1.	Menyusun formula perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan indikator kinerja pada Renstra.	Telah ditindaklanjuti
2.	Memanfaatkan aplikasi PMGIR dan e-SAKIP untuk pengumpulan data kinerja serta monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.	Belum ditindaklanjuti
3.	Mengembangkan IKU pada PK dengan Renstra.	Belum ditindaklanjuti
4.	Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian	Belum ditindaklanjuti

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang

3

No.	Rekomendasi Inspektoral	Tindak Lanjut
1.	reward and punishment serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	
5.	Melakukan pengukuran kinerja sampai ke level individu.	Belum ditindaklanjuti
c) Pelaporan Kinerja		
1.	Mempublikasikan laporan kinerja melalui website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanian agar mudah diakses oleh masyarakat.	Belum ditindaklanjuti
2.	Menyajikan target-target indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur dalam laporan kinerja.	Belum ditindaklanjuti
3.	Memanfaatkan pelaporan kinerja dalam penyusunan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	Belum ditindaklanjuti
d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
1.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar terjadi peningkatan implementasi SAKIP.	Belum ditindaklanjuti
2.	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.	Belum ditindaklanjuti

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap komponen dan sub komponen dengan hasil sebagai berikut:

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanian Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa nilai sebesar **66,53** dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi SAKIP masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,16	21,87
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,07	20,19
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,48	9,47
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,00	15,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			65,72	66,53
Predikat SAKIP			B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 sebagai berikut:

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja adalah sebesar **21,87** dari nilai maksimal **30,00**. Penilaian perencanaan kinerja meliputi 3 sub komponen perencanaan kinerja dengan hasil evaluasi terhadap komponen perencanaan kinerja sebagai berikut:

1.a) Pemenuhan Dokumen Perencanaan kinerja memperoleh nilai 5,40 dari nilai maksimal 6,00

Dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta

penilaian kriteria pada sub komponen 3.c dapat diuraikan kondisi sebagai berikut:

- (1) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai pada Dinas Perumahan Kab. Deli Serdang
- (2) Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam melakukan penyesuaian aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja
- (3) Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja serta melakukan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
- (4) Belum terdapat perubahan budaya kinerja organisasi dengan memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian terhadap komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 15,00 dari nilai maksimal 25,00.

Penilaian perencanaan kinerja melalui 1 sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil evaluasi terhadap komponen evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa seluruh kriteria belum terpenuhi dengan baik dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya diindaklanjuti;
- (2) Belum sepenuhnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal diimplementasikan;
- (3) Belum seluruhnya Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk pertakuan dan peringatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja

b. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih meningkatkan penetapan akuntabilitas kinerja, Inspektoral Kabupaten Deli Serdang merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menetapkan target indikator kinerja "Persentase Luasan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha yang di tangani".
- 2) Menyusun cascading dan prosedure sesuai dengan Renstra 2025-2028 yang telah disusun
- 3) Menyusun laporan evaluasi atas capaian kinerja yang ditetapkan secara berkala (trihulan)

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan Deli Serdang

Menyusun dan mendokumentasikan segala bukti dukung berupa notulen hasil rapat terkait pembahasan capaian kinerja.

Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam melakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja agar lebih efektif dan efisien.

Menjadikan pengukuran kinerja sebagai salah satu indikator dalam melakukan penyesuaian pemberian/pengurangan tunjangan penghasilan.

Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam melakukan penyesuaian organisasi, strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja

Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanian Kab. Deli Serdang

Menyusun laporan kinerja secara trihulan sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan

Mempedomani Peraturan PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dalam menyusun Laporan Kinerja

Mengembangkan capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan/nya untuk peningkatan akuntabilitas kinerja

Memajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Dokumen Laporan Kinerja

Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait target pada Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RK) kepada seluruh pegawai dan menyampaikan tugas dan target pada masing-masing bidang sehingga Dokumen Perencanaan menjadi kepedulian dan tanggung jawab seluruh pegawai.

Menindaklanjuti dan memanfaatkan hasil nilai UKIP dan Evaluasi SAKIP

Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan Deli Serdang

10

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Menyusun laporan evaluasi pencapaian atas rencana aksi yang ditetapkan

(2) Meskipun data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan, pengumpulan data kinerja tersebut belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

(3) Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang dan berkala.

(4) Pengukuran kinerja telah dilakukan namun pengukuran kinerja tersebut belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)

2.c) Pemanfaatan Dokumen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 8,00 dari nilai maksimal 15,00

Berdasarkan hasil evaluasi pada sub komponen 2.c diketahui bahwa Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Adapun penilaian kriteria pada sub komponen 2.c dapat diuraikan kondisi sebagai berikut:

(1) Berdasarkan hasil wawancara secara lisan diketahui pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian pemberian/pengurangan tunjangan penghasilan.

(2) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mempengaruhi penyesuaian organisasi, strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja.

(3) Setiap unit dan pegawai pada satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas pengukuran kinerja.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian terhadap komponen pelaporan kinerja memperoleh nilai 9,47 dari nilai maksimal 15,00. Penilaian pelaporan kinerja melalui 3 sub komponen pelaporan kinerja. Hasil evaluasi terhadap komponen pelaporan kinerja menunjukkan bahwa:

3.a) Pemenuhan Dokumen Laporan memperoleh nilai 2,50 dari nilai maksimal 3,00

Berdasarkan hasil evaluasi pada sub komponen 3.a diketahui bahwa Dinas Perumahan telah menyusun laporan yang menggambarkan kinerja berupa

3. PENUTUP

a. Simpulan

Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai sebesar **65,72** masuk **Predikat B (65,72)**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**BAIK**", yaitu implementasi SAKIP masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Meski sudah mendapat kategori baik, namun masih terdapat beberapa komponen yang harus diperbaiki

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Demikian disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Apresiasi dan Penghargaan atas upaya dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENGETAHUI,
INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG




H. EDWIN NASUTION, SH., M.Si., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741221 199803 1 010

Tim Evaluator,

1. Gita Priscilla Pinem, SH, M.Hum
NIP. 198203122005022002
2. Mulki Ulfansyah SE
NIP. 198908032014021003
3. Listra Doloksaribu, S.Kom
NIP. 19871025 200903 2 006
4. Andi Cella, SH
NIP. 19850426 202012 1 001






Lampiran 4 IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Deli Serdang

**Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni	%	40,95%
2.	Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase areal kawasan permukiman kumuh	%	0,30%
3.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman yang difasilitasi PSU	%	78,50%
4.	Meningkatnya layanan pertanahan untuk kepentingan umum	Persentase cakupan layanan pertanahan untuk kepentingan umum	%	62,50%
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	87 Poin
		Nilai LHE AKIP	Nilai	82 Nilai

Lubuk Pakam,

2025

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Serta Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang



Dr. Herlambang Siregar, ST, MT, IPM, ASEAN Eng.
Pemuda Muda
NIP. 19710216 199703 1 007

Lampiran 5 Pemberian Reward dan Punishment dalam pengukuran kinerja sebagai penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**

Jalan Karya Jasa Nomor 10 Lubuk Pakam Kode Pos – 20514
Telepon. (061) - 795 6296 Faksimile. (061) – 795 6296

Pos-el: perkimtan@deliserdangkab.go.id Laman: www.perkimtan.deliserdangkab.go.id

Nomor : 800.1.6.2/1953/DPKPP/DS/2025
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Teguran Disiplin

Saudara Para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, atas hal tersebut disampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Apel Pagi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 bahwa saudara (daftar nama terlampir) tidak hadir mengikuti apel pagi yang dilaksanakan pada jam 08.00 WIB.

Berkaitan dengan hal tersebut agar semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN sesuai daftar terlampir mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan tanpa terkecuali. Atas pelanggaran yang sudah Saudara lakukan disampaikan teguran melalui surat ini dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Surat Teguran ini disampaikan untuk dapat dijadikan bahan pedoman perbaikan kedepannya, dan apabila yang bersangkutan mengulangi kesalahan yang sama maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Lubuk Pakam, 07 Oktober 2025
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang



Suparno, S.Sos., MSP
Pembina Tk. I/IVb
Nip.197107041998011002

Lampiran Surat
Nomor : 800.1.6.2/1953/DPKPP/DS/2025
Tanggal : 07 Oktober 2025

**DAFTAR NAMA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NON ASN YANG TIDAK MELAKSANAKAN APEL PAGI
PADA HARI SELASA TANGGAL 07 OKTOBER 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KAB. DELI SERDANG**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	BIDANG
1	2	3	4	5	6
1	MUHAMMAD ISTIQAL, S.T	-	-	TENAGA TEKNIS	
2	RAUDHA AWALIA, S.Ars	-	-	TENAGA TEKNIS	
3	ARIE HAZMI	-	-	TENAGA TEKNIS	
4	AZHARI LUBIS	-	-	TENAGA TEKNIS	

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang



Suparno, S.Sos., MSP
Pembina Tk. I/IVb
Nip.197107041998011002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Standar dan Sertifikasi Nasional (BSN).



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**

Jalan Karya Jasa Nomor 10 Lubuk Pakam Kode Pos – 20514

Telepon. (061) - 795 6296 Faksimile. (061) – 795 6296

Pos-el: perkintan@deliserdangkab.go.id Laman: www.perkintan.deliserdangkab.go.id

NOTA – DINAS

Yth. : Bapak Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
D a r i : Kasubbag Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
Tembusan : -
Tanggal : 07 Oktober 2025
Nomor : 008/1958/DPKPP/DS/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Permohonan Penandatanganan Sertifikat Kedisiplinan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sertifikat ini diberikan kepada non ASN sdr. **Siti Amina Dira Ardisa, SM** sebagai pengakuan atas kedisiplinan dalam ketepatan kehadiran masuk kerja dan lebih lama pulang dalam periode bulan September 2025, pemilihan ini berdasar dari pemeriksaan absensi Aplikasi Deli Serdang Sehat, nama tersebut di atas memenuhi kesanggupan untuk mentaati kedisiplinan

Kasubbag Umum Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang

Tetty Khairani Nasution, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19730601 199803 2 011



Sertifikat PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

Siti Amina Dira Ardisa, SM

Sebagai pengakuan atas kedisiplinan dalam ketepatan kehadiran masuk kerja pada bulan
SEPTEMBER tahun 2025 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang

Terimakasih atas kontribusi dan semangat kerja Anda, Semoga Prestasi ini terus dipertahankan dan
menginspirasi rekan kerja lainnya.



Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang

Suparno, S.Sos., MSP
NIP. 19710704 199801 1 002

Lampiran 6 Pengukuran Kinerja sampai ke level Individu

Berdasarkan Sikomin

LAPORAN BULANAN

Bulan: Desember 2025

ATASAN LANGSUNG				PEGAWAI YANG DINILAI					
NAMA	SUPARNO, S.SOS., MSP			NAMA	AFRIZAL HALOMOAN LUBIS				
NIP	19750704 199801 1 002			NIP	19800403 200903 1 003				
PANGKAT	Pembina Tk I			PANGKAT	Penata Tk I				
JABATAN	PIL Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang			JABATAN	PIL Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum				
UNIT KERJA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN			UNIT KERJA	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN				
No	Tanggal	Kode Aktivitas	Aktivitas	Kuantitas		Waktu	Paraf	Keterangan	
				Jlh	Substansi				
1	1 Desember 2025		Melaksanakan Apel Pagi di Dinas Perkimtan	1	Kegiatan	30			
2	1 Desember 2025		Rapat dengan Pengawas Lapangan terkait progres Pelaksanaan Fisik Kegiatan Ta. 2025	1	Kegiatan	400			
3	2 Desember 2025		Rapat dengan Pejabat Fungsional terkait progres di Lapangan	1	Kegiatan	400			
4	3 Desember 2025		Koordinasi dengan Pejabat Fungsinya terkait penyerahan Berita Acara Serah Terima dengan pengembang yang menyerahkan 9 perumahan ke Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1	Kegiatan	400			
5	4 Desember 2025		Rapat dengan staf admin PSU terkait progres dan target pemberkasan yang di kerjakan	1	Kegiatan	400			
6	5 Desember 2025		Rapat dengan Kepala Dinas terkait Pembentukan pos Komando tanggap darurat Bencana Banjir Kecamatan di Kab. Deli Serdang	1	Kegiatan	400			
7	8 Desember 2025		Rapat dengan Pengawas Lapangan terkait Progres Fisik di Lapangan	1	Kegiatan	400			
8	9 Desember 2025		Briefing dengan Pengawas Lapangan terkait Progres Fisik di Kecamatan Tumpatan	1	Kegiatan	400			
9	10 Desember 2025		Briefing dengan Tim Pengawas BHL terkait Lokasi yang akan di laksanakan	1	Kegiatan	400			
10	11 Desember 2025		Briefing dengan Pajabat Fungsinya terkait Kerang Acuan PSU 2025	1	Kegiatan	400			
11	17 Desember 2025		Briefing dengan Pengawas Lapangan terkait progres fisik di kegiatan perumahan alam lestari kecamatan percut sei tuan	1	Kegiatan	400			
12	15 Desember 2025		Briefing dengan Pengawas Lapangan Kecamatan Lubuk Pakam terkait progres fisik Perumahan BSP	1	Kegiatan	400			
13	16 Desember 2025		Melaksanakan Apel Pagi di Dinas Perkimtan	1	Kegiatan	30			
14	16 Desember 2025		Koordinasi dengan Pihak UKPSU terkait draft kontrak Plank Proyek	1	Kegiatan	400			
15	17 Desember 2025		Rapat dengan staf admin PSU terkait progres dan target pemberkasan yang sudah SPM	1	Kegiatan	400			
16	18 Desember 2025		Melaksanakan monitoring Pembangunan Jalan Lingkungan menuju objek wisata alam nandoy di Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa	1	Kegiatan	400			
17	19 Desember 2025		Rapat dengan Tim Quantity terakhir Data Realisasi Fisik	1	Kegiatan	400			
18	22 Desember 2025		Melaksanakan apel pagi di Dinas perkimtan	1	Kegiatan	30			
19	22 Desember 2025		Melaksanakan monitoring Pembangunan Jalan Lingkungan Perumnas Mandala Kec. Percut Sei Tuan	1	Kegiatan	400			
20	23 Desember 2025		Melaksanakan monitoring ke Perumnas Mandala Kelurahan Kerangan Kecamatan Percut Sei Tuan	1	Kegiatan	400			
21	24 Desember 2025		Rapat pembahasan dengan Tim Konsultan terkait kegiatan Updating yang akan di laksanakan	1	Kegiatan	400			
22	26 Desember		Rapat dengan Tim Quantity terakhir Data Realisasi	1	Kegiatan	400			

	2025		Fisik					
22	22 Desember 2025		Melaksanakan apel Pagi di dinas perkumtan	1	Kegiatan	30		
24	24 Desember 2025		Rapat dengan staf admin PSU terkait progres dan target pemberkasan yang sudah SPM	1	Kegiatan	400		
25	30 Desember 2025		Pendamping Kepala Dinas menghadiri jadwal acara kegiatan harian bupati deli serdang terkait Paron Perdana Cabai Merah Bersama Kelompok Tari Bersama Desa Deli Tua	1	Kegiatan	400		
26	31 Desember 2025		Menghadiri Rapat terkait Kesiapsiagaan Nataru Tahun 2025/2026 di Kantor Bupati Deli Serdang	1	Kegiatan	400		

1. Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

8

SUPARNO, S.SOS., MSP
NIP. 19710704 199801 1 002

Lubuk Pakam, 31 Desember 2025
Pegawai yang melaporkan



AFRIZAL HALOMOAN LUBIS
NIP. 19860403 200903 1 003



DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

PERIODE : PERIODE FINAL

PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG

PERIODE PENILAIAN:

1 MARET SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

1.	PEGAWAI YANG DINILAI	
	NAMA	: AFRIZAL HALOMOAN LUBIS, ST
	NIP	: 198604032009031003
	PANGKAT/GOL RUANG	: Penata Tingkat I / III/d
	JABATAN	: Plt. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
	UNIT KERJA	: Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
2.	PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: SUPARNO, S.Sos., MSP
	NIP	: 197107041998011002
	PANGKAT/GOL RUANG	: Pembina Tingkat I / IV/b
	JABATAN	: Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	UNIT KERJA	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	: ASRI LUDIN TAMBUNAN
	NIP	:
	PANGKAT/GOL RUANG	:
	JABATAN	: Bupati Deli Serdang
	UNIT KERJA	: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
4.	EVALUASI KINERJA	
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	: -
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	: BAIK
5.	CATATAN/REKOMENDASI	

lubuk pakam, 30 Desember 2025

7. Pegawai yang Dinilai

AFRIZAL HALOMOAN LUBIS, ST
198604032009031003

lubuk pakam, 30 Desember 2025

6. Pejabat Penilai Kinerja

SUPARNO, S.Sos., MSP
197107041998011002

**EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF**

PERIODE: Periode Final

PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG

PERIODE PENILAIAN: 1 MARET SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

PEGAWAI YANG DINILAI				PEJABAT PENILAI KINERJA			
1	NAMA	AFRIZAL HALOMOAN LUHS, ST	1	NAMA	SUPARNO, S.Sos., MSP		
2	NIP	198604032009031003	2	NIP	197107041998011002		
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b		
4	JABATAN	Pt. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	4	JABATAN	Pt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		
5	UNIT KERJA	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	5	UNIT KERJA	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI							
POLA DISTRIBUSI:							
HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAH BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UTAMA							
1	(SEHAT LINGKUNGANNYA) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman Indikator : Persentase kawasan permukiman yang difasilitasi PSU	Tersedianya PSU memadai di kawasan perumahan dan permukiman	Kuantitas	Persentase kawasan permukiman yang difasilitasi PSU memadai	84,5%	Tercapai berdasarkan https://drive.google.com/drive/folders/1m2tr3q7DAU60ni-GWqWwmYahmtQ3dDr7us-p-sharing	Pimpinan: ●
2	(SEHAT LINGKUNGANNYA) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman Indikator : Persentase kawasan permukiman yang difasilitasi PSU	Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman	Kuantitas	Persentase PSU perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	81%	Tercapai berdasarkan https://drive.google.com/drive/folders/1m2tr3q7DAU60ni-GWqWwmYahmtQ3dDr7us-p-sharing	Pimpinan: ●

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAH BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	(SEHAT LINGKUNGANNYA) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman Indikator : Persentase kawasan permukiman yang difasilitasi PSU	Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman	Kuantitas	Persentase PSU perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	79%	Tercapai berdasarkan https://drive.google.com/drive/folders/1m2tr3q7DAU60ni-GWqWwmYahmtQ3dDr7us-p-sharing	Pimpinan: ●
4	(SEHAT LINGKUNGANNYA) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman Indikator : Persentase kawasan permukiman yang difasilitasi PSU	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	Kuantitas	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan	10 Laporan	Tercapai berdasarkan https://drive.google.com/drive/folders/1m2tr3q7DAU60ni-GWqWwmYahmtQ3dDr7us-p-sharing	Pimpinan: ●
5	(SEHAT LINGKUNGANNYA) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman Indikator : Persentase kawasan permukiman yang difasilitasi PSU	Tersedianya dokumen perencanaan dan pendataan prasarana, sarana dan utilitas perumahan	Kuantitas	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan	10 Dokumen	Tercapai berdasarkan https://drive.google.com/drive/folders/1m2tr3q7DAU60ni-GWqWwmYahmtQ3dDr7us-p-sharing	Pimpinan: ●
TAMBAHAN							
RATINGS HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI							
PERILAKU KERJA						UMPAH BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	
1	Berorientasi Pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti					Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan: ●
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan					Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan: ●
3	Kompeten						



[BERANDA](#)

[PROFIL](#)

[KEGIATAN](#)

[KEJANGAN](#)

[PENGADAAN](#)

[UNDUHAN](#)

[SATU DATA](#)

[RPID](#)

[KONTAK](#)

Unduhan

Beranda / Unduhan

Search:

No	Nama	Tanggal	Link
1	Berita Acara Reviu Renstra Dinas Perkimtan 2019-2024	2021-01-11	Unduh Berkas
2	Rencana Kerja Dinas Perkimtan Tahun 2023	2022-08-01	Unduh Berkas
3	Renstra Dinas Perkimtan 2019-2024	2018-04-23	Unduh Berkas
4	Renstra Dinas Perkimtan 2019-2024 (Perubahan)	2020-04-17	Unduh Berkas
5	Renstra Dinas Perkimtan 2025-2026	2023-12-05	Unduh Berkas
6	LKIP 2024	2025-04-01	Unduh Berkas
7	Renja 2024	2023-07-19	Unduh Berkas
8	Renja Perubahan 2024	2024-08-23	Unduh Berkas
9	Renja 2025 perubahan	2025-06-10	Unduh Berkas
10	Profil Dinas Perkimtan	2025-04-18	Unduh Berkas

Showing 1 to 10 of 12 entries

Previous

1

2

Next

The screenshot shows the homepage of the official website of the Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. The header features the department's name in large blue letters. Below the header, there are navigation menus for various services like 'PENGANTARAN SURAT', 'PEMBAYARAN DOKUMEN', etc. The main content area is titled 'BERITA TERKINI' (Latest News) and displays three news items with thumbnail images and brief descriptions. At the bottom, there is a section titled 'SISTEM INFORMASI' (Information System) which lists different types of housing information available, such as 'Informasi Pemukiman', 'Rumah', and 'Layanan Informasi'.

Lampiran 8 tanggapan/Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun n-1

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI INTERNAL (LHEI) AKIP TAHUN 2024 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG

No.	Rekomendasi LHEI 2024 Dari Inspektorat	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target (Output)	Waktu Pelaksanaan	Status/ Progres Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
A. Perencanaan					
1.	Menetapkan target indikator sasaran meningkatnya infrastruktur dasar permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya penataan dan pemanfaatan tanah pada Renstra	Target indikator sasaran Renstra akan disesuaikan dengan indikator tujuan Renstra, di mana target indikator tujuan Renstra adalah target indikator sasaran pada RPJMD yaitu <i>Indeks Infrastruktur</i>	1 dokumen	TW II dan TW III Tahun 2025	Dalam pelaksanaan
2.	Menyelaraskan indikator kinerja pada PK, Renja dan Rencana Aksi dengan indikator kinerja pada Renstra	Indikator kinerja pada PK akan disesuaikan dengan indikator sasaran Renstra, begitu juga dengan Rencana Aksi untuk mencapai target kinerja pada indikator sasaran Renstra	1 dokumen	TW IV Tahun 2025 (penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025)	Akan dilaksanakan
3.	Membuat target indikator kinerja yang jelas, dapat diukur dan dapat dicapai sesuai dengan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound (SMART) pada seluruh dokumen perencanaan	Target indikator kinerja disusun oleh para Kepala Bidang dan disusun dengan menyesuaikan dengan data baseline pada periode renstra sebelumnya. Untuk target indikator kinerja yang baru yang tidak berkaitan dengan periode sebelumnya dan tidak memiliki baseline, maka akan dihitung dengan tetap berkaitan dengan target regional dan nasional. Selain itu perhitungan juga memperhatikan proporsi anggaran setiap tahunnya.	1 dokumen	TW II dan TW III Tahun 2025	Dalam pelaksanaan
4.	Menyesuaikan Program pada PK dengan program yang tercantum dalam Renstra	Mengusulkan Program yang akan digunakan dalam penyusunan seluruh kegiatan pada PD untuk dicantumkan dalam RPJMD, kemudian akan dijelaskan pada Renstra, dan akan dituangkan setiap tahunnya dalam PK.	1 dokumen	TW IV Tahun 2025 (penyusunan PK Tahun 2025)	Akan dilaksanakan
5.	Menjadikan Renstra yang telah diperbaiki dalam penyusunan cascading	Renstra yang telah memuat IKU, akan dijabarkan dalam penyusunan Pohon Kinerja, dan Cascading. Setiap IKU akan dijabarkan melalui Program, Kegiatan dan Subkegiatan untuk mencapai target kinerjanya.	1 dokumen	TW III dan TW IV Tahun 2025	Dalam pelaksanaan

No.	Rekomendasi LHEI 2024 Dari Inspektorat	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target (Output)	Waktu Pelaksanaan	Status/ Progres Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
6.	Memanfaatkan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Menyusun perencanaan kinerja setiap tahunnya dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam membiayai belanja untuk mendukung pencapaian kinerja, sehingga target kinerja dapat dicapai dengan relevan sesuai tujuan dalam waktu yang telah ditentukan.	1 dokumen	TW II dan TW III Tahun 2025	Dalam pelaksanaan
B. Pengukuran Kinerja					
1.	Membuat formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan indikator kinerja pada Renstra	Menyusun formulasi perhitungan IKU dengan memperhatikan ketersediaan data, menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku sehingga IKU menjadi indikator yang spesifik, dapat diukur, relevan dan dapat dicapai	1 dokumen	TW II dan TW III Tahun 2025	Dalam pelaksanaan